



Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah

Maryam D. Poma
I Kadek Satria Arsana
Iin Laki
Ansar Sahabi
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
Pos-el: satriaarsana28@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v7i4.479

Abstrak

Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara merata. Bulango Ulu merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Bulango Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran kecamatan dalam peningkatan pembangunan di Kecamatan Bulango Ulu. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi, sikap, dan pengelolaan sumber daya alam. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten merupakan komunikasi searah dan belum ada *feedback* ataupun respon yang serius dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan perhatian maupun solusi sebab anggaran yang dibutuhkan cukup besar dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Sikap aparat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Namun ada beberapa aparat yang kurang ramah ketika melayani masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di Kecamatan Bulango Ulu belum optimal. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulango Ulu tergolong berjalan dengan lamban. Oleh karena itu, dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan belum berjalan optimal meskipun sudah 14 (empat belas) tahun dimekarkan.

Kata Kunci

Pemekaran kecamatan, pembangunan daerah, peningkatan pelayanan

Abstract

Regional expansion aims to increase development evenly. Bulango Ulu is a new sub-district which is a division of North Bulango District. This study aims to determine the impact of sub-district expansion in increasing development in Bulango Ulu District. This research uses a qualitative descriptive research type. The focus in this research is communication, attitude, and natural resource management. In this study, data were obtained from primary data and secondary data through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study indicate that communication between the sub-district government and the district government is a one-way communication and there has been no serious feedback or response from the government. The Government of Bone Bolango Regency has not given attention or solutions because the required budget is quite large in providing adequate infrastructure. The attitude of the apparatus in providing services to the community is good. However, there are some officers who are less friendly when serving the community. The ability of the community to manage natural resources in Bulango Ulu District is not optimal. Infrastructure development in Bulango Ulu District is running slowly. Therefore, the impact of the division of sub-districts in increasing development has not been optimal even though it has been 14 (fourteen) years of division.

Keywords

District expansion, regional development, service improvement

Pendahuluan

Negara Indonesia terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang terdapat daerah dalam suatu pemerintahan, serta diatur dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang (Simandjuntak, 2016). Pembentukan tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan pengelolaan pemerintahan melalui otonomi daerah. Selain itu, pembentukan atau pemekaran daerah memiliki tujuan peningkatan dalam bidang pelayanan bagi publik dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Pemerintah memiliki hubungan otoritas wewenang antara tingkat pusat dan provinsi serta

kabupaten dan kota, semua diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18A tentang pemerintah daerah yang mengutamakan karakteristik serta keragaman suatu wilayah, (Herwanto et al., 2020). Tidak hanya itu, pembentukan atau pemekaran kecamatan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. Disebutkan dalam pasal 2 bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan akan dibentuk dalam suatu wilayah kabupaten atau wilayah kota.

Secara administratif kecamatan terbagi beberapa wilayah yang terdiri atas desa atau kelurahan yang berada pada tingkatan bawah kabupaten atau kota. Indonesia mempunyai tatanan otonomi daerah di mana kecamatan sebagai komponen wilayah kabupaten dan kota memiliki area kerja dengan pemimpinnya yaitu camat pada umumnya (Simanjuntak et al., 2019), namun ada juga sebutan lainnya di sebagian daerah di Indonesia seperti Papua disebut Kepala Distrik, Nanggroe Aceh Darussalam (Sagoe Cut) dan Daerah Istimewa Yogyakarta disebut Kemanren atau Mantri Pamong Praja untuk daerah perkotaan sedangkan untuk tingkat kabupaten disebut dengan Kapanewon atau Panewu. Terbentuknya kecamatan adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten atau kota dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin (Ayuningtiyas et al., 2020). Hal ini membuat pemisahan atau pemekaran kecamatan sangat diperlukan bilamana akses pelayanan yang sulit untuk dijangkau oleh masyarakat akibat dipengaruhi oleh infrastruktur yang terbatas dan jarak yang cukup jauh. Bukanlah suatu hal yang sangat mudah ketika melaksanakan pemekaran wilayah kecamatan yaitu dari satu kecamatan yang kemudian dibagi menjadi dua kecamatan bahkan lebih. Pemekaran wilayah ini membutuhkan sumber daya manusia yang cukup, memiliki kantor kecamatan sendiri, mempunyai fasilitas kantor yang mendukung, sekaligus di dalamnya terdapat biaya operasional agar dapat menunjang demi memperlancar pelaksanaan kegiatan pada pemerintah kecamatan (Fauzani Raharja, 2017).

Pelaksanaan pemekaran ini tentu dapat menyingkat potensi kendali baik pemerintah maupun masyarakat, terkhusus wilayah yang belum merasakan fasilitas pemerintahan yang memadai. Pemerintah sangat mengharapkan dengan dilaksanakan pemekaran kecamatan harus dapat menunjang masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan mempercepat proses pembangunan pada daerah pemekaran. Sebagai otonomi daerah bentuk baru, pemerintah kecamatan memiliki otoritas dan wewenang penuh untuk mengatur pemerintahannya, namun tetap berada pada koridor undang-undang. Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat dengan mudah mengatur dan mendorong pembangunan daerah administrasinya.

Pemekaran kecamatan juga berlaku di Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango yakni Kecamatan Bulango Ulu. Provinsi Gorontalo merupakan daerah regional yang juga dimekarkan pada tahun 2000, (Lumy et al., 2021) & (Siregar, 2019). Umur daerah yang masih tergolong baru ini membuat kesenjangan pembangunan masih menjadi permasalahan yang serius, sehingga melalui pemekaran kecamatan tersebut diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di Gorontalo. Sebelumnya Kecamatan Bulango Ulu ini merupakan bagian dari Kecamatan Bulango Utara dengan cakupan kerja yang luas sehingga adanya antrian yang cukup banyak membuat masyarakat lainnya merasa terabaikan pada saat pengurusan keperluan di kantor kecamatan.

Melalui pemekaran kecamatan ini masyarakat diharapkan akan lebih mudah untuk mengurus keperluan dengan cepat karena jarak tempuh yang sudah semakin dekat. Adanya kinerja aparat yang baik, terampil, dan struktur pemerintahan yang memadai dengan sarana dan prasarana yang mendukung serta prosedur kerja yang nyata tentu dapat menciptakan kepuasan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini kecamatan akan cepat terwujud serta pengurusan administrasi menjadi lebih mudah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ayuningtiyas et al., 2020) bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, pemekaran kecamatan juga berdampak baik terhadap pembangunan daerah (Asrida & Rakasiwi, 2014) seperti pembenahan infrastruktur jalan, sehingga secara tidak langsung akan merangsang perekonomian. Selain itu, (Mudana et al., 2016) menjelaskan bahwa sebanyak 80% responden memiliki pandangan dengan terbentuknya kecamatan dapat memberi dampak yang baik terhadap ketersediaan infrastruktur dan khususnya pembangunan daerah. Dampak positif tersebut karena dipengaruhi oleh faktor pemerintahan dan masyarakat yang turut andil dalam mewujudkan pembangunan,

(Lantara, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya pemekaran daerah kecamatan, pendapatan suatu daerah akan meningkat dan terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Melihat pentingnya pemekaran dalam meningkatkan pembangunan daerah yang merata, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pelaksanaan pemekaran kecamatan berdampak pada peningkatan pembangunan di Kecamatan Bulango Ulu.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan penelitian deskriptif. Denzin dan Lincoln dikutip dari (Moleong, 2006) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan metode yang ada dengan latar alamiah dalam menafsirkan fenomena yang terjadi. Adapun indikator yang menjadi fokus dalam penelitian pelaksanaan pemekaran Kecamatan Bulango Ulu yaitu komunikasi yang dalam hal ini merupakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat yakni antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten memiliki hubungan timbal balik dalam perencanaan program pelayanan pembangunan kecamatan diidentikkan dengan fasilitas sarana/prasarana bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik pada aktivitas mereka sebagai penduduk (Nasution, 2007). Administrasi kemajuan ini mencakup pengaturan listrik, jembatan, dan jalan. Sikap adalah perilaku aparat yang diutamakan dalam kualitas pelayanan yang disesuaikan pada harapan, kebutuhan, serta tuntutan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam adalah kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi kualitatif, wawancara, dan teknik dokumentasi. Data primer diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan informan (camat, sekretaris camat, bidang pembangunan dan masyarakat sedangkan data sekunder atau data pendukung diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian serta data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. Data yang diperoleh dari tempat penelitian akan dianalisis menggunakan metode sesuai dengan penelitian kualitatif berdasarkan sumber jawaban dari informan yang telah diwawancarai oleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan melalui hasil diskusi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Indikator Sosial

Tabel 1

Indikator Sosial Kecamatan Bulango Ulu Tahun 2019

No	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jarak Dari Desa Ke Ibukota Kecamatan
1	Owata	18.14	1,159	0.96	64	2.0
2	Mongiilo	17.74	897	0.79	51	0.0
3	Mongiilo Utara	9.42	699	1.01	74	3.5
4	Pilolaheya	12.63	520	0.78	41	5.0
5	Ilomata	7.84	530	0.76	68	5.5
6	Suka Makmur	12.64	446	0.22	35	6.0
Bulango Ulu		78.41	4,251	0.81	54	-
Kab. Bone Bolango		1,915.44	164,983	1.19	86.32	-

Sumber: (BPS, 2020)

Dari (tabel 1) terlihat bahwa Desa Owata merupakan desa yang paling luas wilayahnya bila dibandingkan dengan kelima desa yang terdapat di Kecamatan Bulango Ulu yakni sebesar 18.14 Km² atau sekitar 23.13% dari luas wilayah kecamatan. Meskipun desa yang terluas tetapi penduduknya masih kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah. Hal ini terbukti dari tingkat kepadatan penduduk yang berada pada urutan ketiga di Kecamatan Bulango Ulu yakni 64 orang per km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,159 jiwa. Desa Owata juga merupakan desa yang paling dekat jarak tempuhnya ke Ibukota kecamatan yakni 2.0 Km². Luas wilayah yang kedua adalah

Desa Mongiilo yang juga merupakan Ibukota kecamatan dengan luas 17.74 Km² atau 22.62% dengan jumlah penduduk yakni 897 jiwa. Desa dengan luas terkecil di Kecamatan Bulango Ulu adalah Desa Ilomata yakni 7.84 atau 9.99% dengan jumlah penduduk sebesar 530 jiwa.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten Bone Bolango, luas wilayah Kecamatan Bulango Ulu hanya sekitar 4,09% atau 78.41 Km² dari luas wilayah Kabupaten Bone Bolango 1,915.44 Km² atau 100%. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bulango Ulu masih dibawah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone Bolango yakni 0.81 banding 1.19. Meskipun Kecamatan Bulango Ulu merupakan wilayah yang cukup luas namun jumlah penduduknya masih sangat kurang dengan tingkat kepadatan 54 jiwa per Km². Secara administrasi Kecamatan Bulango Ulu terletak di 0⁰36'59.76"-0⁰46'33.6" Lintang Utara dan 123⁰5'57.48"-123⁰18'50.4" Bujur Timur dengan batasan wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Atinggola, sebelah timur (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), sebelah selatan (Kecamatan Suwawa Timur) dan sebelah barat (Kecamatan Tapa) (BPS, 2020).

Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pembangunan Daerah Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi antara pihak-pihak yang terlibat yakni antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten yang memiliki hubungan timbal balik dalam perencanaan program pelayanan pembangunan kecamatan, serta diidentikkan dengan fasilitas sarana/prasarana bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik pada aktivitas mereka sebagai penduduk. Administrasi kemajuan ini mencakup pengaturan listrik, jembatan, dan jalan. Setiap kebijakan yang diterapkan pada masyarakat akan membutuhkan komunikasi bagi para pembuat keputusan dan para implementator yang konsisten dalam menjalankan setiap kebijakan.

Melalui kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti bahwa komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango terjalin dengan baik dan rutin dilakukan. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini bahwa belum adanya hasil yang optimal di wilayah kecamatan. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan hanya komunikasi yang bersifat satu arah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan *feedback* ataupun respon kepada pemerintah kecamatan dikarenakan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi. Hal ini yang diduga menjadi faktor utama pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum merespon apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintah kecamatan yang dalam hal ini pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur dengan pengadaan atau revitalisasi total, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah mengalihkan pembangunan infrastruktur Kecamatan Bulango Ulu kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sikap Pelayanan Publik

Sikap dari aparat memiliki pengaruh yang besar dalam melihat berhasil atau tidaknya sebuah kinerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terutama aparat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti tindakan apa dan bagaimana sikap seharusnya yang wajib dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh para pemberi pelayanan.

Hasil wawancara dengan informan kunci, WN selaku Camat Bulango Ulu menyatakan: "Sikap aparat kecamatan dalam melayani masyarakat dengan melihat masalah yang ada di kantor, aparat sudah memberikan sikap yang baik kepada masyarakat dalam mengurus keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada sudah cukup baik. Aparat sudah mengusahakan yang terbaik untuk keperluan yang dibutuhkan masyarakat agar bisa segera dipenuhi."

Berdasarkan pernyataan yang diperoleh, peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa sikap aparat dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat sudah baik dan selalu berusaha yang terbaik untuk memenuhi kepuasan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan. Namun, terdapat aparat yang memberikan pelayanan atau melayani dengan sikap kurang ramah. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap sikap aparat dalam memberikan pelayanan yakni emosional

(*bad mood*), anggapan bukan orang penting, dan juga karena faktor kemampuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki petugas, (Eriswanto & Sudarma, 2017).

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Implementasi suatu kebijakan sangat penting dikelola melalui sumber daya alam. Kemampuan yang didasari pengetahuan oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia akan menentukan suatu keberhasilan pada proses implementasi kebijakan.

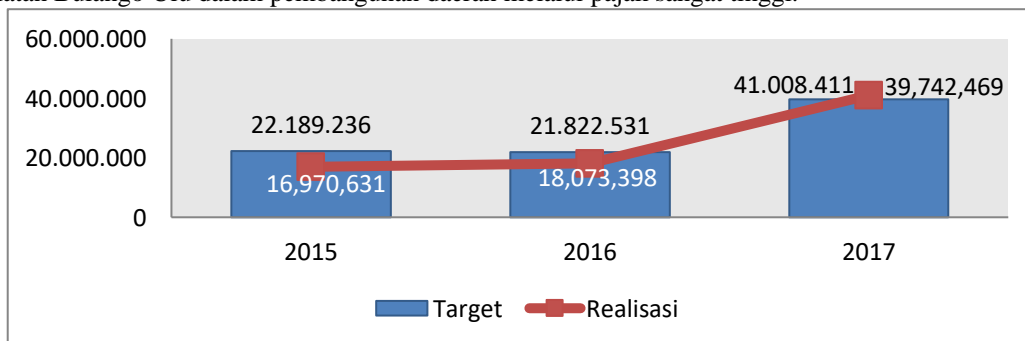
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci WN, selaku camat Bulango Ulu menyatakan bahwa, “Sumber daya alam yang ada di kecamatan Bulango Ulu sangat melimpah. Terutama jagung, gula aren, dan kelapa. Sayangnya, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan masyarakat belum cukup optimal dikarenakan kemampuan dan pengetahuan masyarakat masih kurang. Untuk pengelolaannya, Dinas Pertanian Kabupaten Bone Bolango sudah pernah memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Sedangkan cara pengelolaan itu sendiri diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.” Kemudian, ditambahkan oleh informan AW, selaku masyarakat Kecamatan Bulango Ulu menyatakan bahwa: “Pengelolaan sumber daya alam yang ada di kecamatan dikelola sendiri oleh masyarakat. Meskipun belum cukup optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Kami harus mengembalikan hutang yang kami pinjam untuk keperluan pupuk, bibit, serta keperluan lainnya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Kecamatan Bulango Ulu sangat melimpah. Tapi dalam pengelolaan sumber daya alam belum optimal karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat untuk mengelolanya. Selain itu, kurangnya bantuan dari pemerintah baik itu dana ataupun memberikan penyuluhan mengenai cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam agar memperoleh hasil yang optimal. Akibatnya masyarakat banyak yang tidak bisa merasakan hasil dari pengolahan sumber daya alam yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan daerah, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan daerah. Program ataupun kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah akan dilaksanakan oleh masyarakat sebab sasaran utamanya adalah masyarakat. Kontribusi masyarakat di Kecamatan Bulango Ulu cukup tinggi terhadap perkembangan pembangunan daerah.

Jika dilihat dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak mulai tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2017 kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak melampaui jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah yakni realisasi PBB sebesar 41.008.411 juta rupiah (gambar 1) dengan target 39.742.469 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Bulango Ulu dalam pembangunan daerah melalui pajak sangat tinggi.



Gambar 1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Masyarakat Tahun 2015-2017.
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dampak Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah

Tujuan utama dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan adalah untuk menurunkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Secara administratif wilayah induk dan mekaran akan semakin dipersempit dan masing-masing wilayah memiliki kepemimpinan tersendiri. Artinya pengelolaan pemerintahan, sumber daya ekonomi, dan pendapatan daerah akan dikelola oleh pemerintah setempat dengan cakupan wilayah yang tidak luas. Sehingga hal ini akan mempermudah untuk membangun daerah dari bawah (*bottom up*). Keberhasilan daerah dengan adanya pemekaran dapat dinilai melalui dua aspek, yakni sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur

Aspek pembangunan pada infrastruktur dapat dilihat dan dirasakan secara nyata sejauh mana pembangunan itu terjadi setelah adanya pemekaran. Infrastruktur yang dimaksud adalah adanya aliran listrik ke seluruh wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung berupa jalan aspal dengan tersedianya jalan yang baik akan memperlancar dan mempengaruhi perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, meningkatnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat setempat dan juga sarana pendidikan. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulango Ulu setelah adanya pemekaran memiliki dampak yang baik, namun tidak signifikan. Sebab pembangunan infrastruktur di daerah tersebut berjalan sangat lambat.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui pemekaran daerah harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan. Adanya pemekaran daerah sangat berdampak juga pada kualitas pelayanan publik. Sehingga terbukti dengan benar adanya pembentukan daerah baru atau dikenal dengan istilah pemekaran memiliki dampak dari sisi positif dan negatif pada pelayanan publik. Dampak positifnya masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan yang berurusan dengan pemerintahan kecamatan jauh lebih mudah. Hal ini dikarenakan jarak antara pemerintah kecamatan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Bulango Ulu cukup dekat, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses kantor pemerintahan. Dampak negatifnya masyarakat kurang terlayani dengan baik. Hal ini disebabkan karena fasilitas pelayanan yang kurang memadai.

Pembahasan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, pelaksanaan pemekaran Kecamatan Bulango Ulu yang ditinjau dari 3 (tiga) indikator yaitu komunikasi, sikap, dan pengelolaan sumber daya alam diuraikan sebagai berikut.

Komunikasi adalah hubungan para pihak yang terlibat yakni antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten yang memiliki hubungan timbal balik dalam perencanaan program pelayanan pembangunan kecamatan yang diidentikkan dengan fasilitas sarana/prasarana bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik pada aktivitas mereka sebagai penduduk. Administrasi kemajuan ini mencakup pengaturan listrik, jembatan, dan jalan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti bahwa komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten merupakan komunikasi searah dan belum ada *feedback* ataupun respon. Pemerintah Kecamatan yang sudah berupaya melakukan komunikasi agar pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulango Ulu bisa segera terealisasi tapi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan perhatian maupun solusi yang terbaik dikarenakan anggaran yang dibutuhkan cukup besar untuk menyediakan infrastruktur yang memadai.

Sikap adalah perilaku aparat dengan memprioritaskan pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan, kebutuhan, dan menjadi hak masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sikap aparat pada saat melayani masyarakat dapat dikatakan pelayanannya sudah baik. Namun, masih ada aparat yang tidak memberikan pelayanan yang baik disebabkan berbagai macam alasan. Sikap yang ditunjukkan aparat ini tidaklah baik karena pelayanan yang baik juga merupakan hak yang harus diperoleh masyarakat sebagai pelayanan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat yang mengurus keperluan di kantor kecamatan harus menunggu sampai 4 (empat) hari hanya untuk sebuah surat.

Pengelolaan sumber daya alam adalah kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti bahwa kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang di Kecamatan Bulango Ulu belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan modal awal untuk pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah kecamatan tidak memberikan bantuan ataupun penyuluhan tentang cara pengelolaan sumber daya alam



secara optimal. Akibatnya, dari hasil pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dirasakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Jika dilihat dari kontribusi masyarakat di Kecamatan Bulango Ulu dalam pembangunan daerah mekaran yang kecamatan induknya adalah Kecamatan Bulango Utara sangat tinggi. Kontribusi nyata masyarakat yang dapat dilihat adalah masyarakat secara sadar pajak bumi dan bangunan (PBB) mampu dibayar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bulango Ulu terealisasi melampaui target yang ditentukan oleh pemerintah.

Keberhasilan pembangunan daerah melalui pemekaran wilayah dapat dinilai melalui dua aspek yakni aspek pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini dapat dilihat melalui perubahan-perubahan yang tidak hanya dapat dirasakan, namun riil adanya perubahan dari sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bulango Ulu tergolong berjalan dengan lamban tidak signifikan. Aspek lainnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan yang diberikan di kecamatan mekaran (pecahan) tergolong baik namun belum maksimal.

Simpulan

Pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kecamatan Bulango Ulu masih berjalan sangat lamban. Meskipun pihak pemerintah kecamatan telah melakukan komunikasi secara intensif ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, namun belum mendapat respon. Akibatnya, sejak pemekaran hingga saat ini belum terlihat secara signifikan adanya perubahan pembangunan infrastruktur baik itu jalanan aspal, jembatan, dan penyediaan listrik. Sikap yang ditunjukkan oleh aparat dalam pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sudah baik. Namun pengelolaan sumber daya belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang optimal dalam kemampuan dan pengetahuannya terhadap potensi sumber daya alam yang ada. Di sisi lain, adanya pemekaran kecamatan memberikan efek positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat merasa dengan mudah mengakses kantor kecamatan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan administrasi.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah Kecamatan Bulango Ulu dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui komunikasi yang intensif untuk pembangunan Kecamatan Bulango Ulu yang lebih baik. Sikap profesional aparat dalam melayani masyarakat melalui pemberian pelatihan kepada aparat untuk meningkatkan kualitas layanan di kecamatan. Perlunya penyuluhan dari Pemerintah Kecamatan mengenai cara pengelolaan sumber daya alam secara optimal sehingga pengetahuan masyarakat dalam mengelola dapat lebih baik dan dapat merasakan hasilnya. Perlunya peran pemerintah dalam memperhatikan kondisi dan keadaan di Kecamatan Bulango Ulu baik itu dari segi pembangunan, pelayanan publik, dan juga sosialisasi ataupun penyuluhan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Kecamatan Bulango Ulu agar masyarakat tidak terlalu berharap bantuan dari pemerintah untuk mengelola potensi daerah.

Daftar Rujukan

- Asrida, W., & Rakasiwi, A. (2014). *Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012*. Riau University. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3231>
- Ayuningtiyas, A., Sagala, I., & Hartono, S. (2020). *Dampak Pemekaran Kecamatan Induk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/4916/>
- BPS, B. P. S. K. B. B. (2020). *Kecamatan Bulango Ulu Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bone Bolango.
- Eriswanto, E., & Sudarma, A. (2017). *Pengaruh Sikap dan Kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan Publik RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9252>
- Fauzani Raharja, I. (2017). *Telaah Hukum Kelayakan Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus: Pemekaran Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci)*. *Fakultas Hukum Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/606/>
- Herwanto, L., Muh. Sabaruddin Sinapoy, & Kamaruddin Jafar. (2020). *Konkurensi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Prinsip Otonomi Daerah*. *Halu Oleo Legal Research*, 2(1), 54. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/10613>

- Lantara, L. A. T. A. (2016). Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626428.pdf>
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32723.19.2.2018>
- Moleong, L. J. (2006). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mudana, M., Nempung, T., & Millia, H. (2016). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi UHO*, 1(1). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE/article/view/776/543>
- Nasution, Z. (2007). Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta*.
- Simandjuntak, R. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Journal de Jure*, 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Simanjuntak, A., Perdana, I., & Martua, J. (2019). Analisis Yuridis Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Tectum*. *Jurnal Tectum*, 1(1). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/984>
- Siregar, A. P. (2019). Dampak Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 8(1), 58–71. <https://doi.org/10.33005/adv.v8i1.1602>